

ABSTRAK

Krisis air bersih di Kabupaten Banyumas pada periode 2019-2024 belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang krusial, terutama karena keterkaitannya dengan masalah kesehatan seperti *stunting*, dimana Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa krisis air bersih mempengaruhi 60% kasus *stunting*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor politik anggaran yang melatarbelakangi belum efektifnya penanganan krisis tersebut. Dengan menggunakan metode *mixed methods*, penelitian ini mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kualitatif, menggunakan teori *Political Budget Cycle* (PBC) dan teori Model Kebijakan *Incremental* digunakan untuk menganalisis dinamika dan pola alokasi anggaran air bersih dalam APBD Kabupaten Banyumas periode 2019-2024. Sedangkan secara kuantitatif, penelitian ini mengkaji korelasi antara isu air bersih dengan preferensi politik masyarakat dalam kontestasi Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran air bersih di Kabupaten Banyumas menunjukkan indikasi pola *Political Budget Cycle*, ditandai dengan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan mendekati tahun pemilihan umum, yang tidak sepenuhnya berdasar pada kebutuhan teknis. Selain itu, kebijakan yang diambil bersifat *incremental*, yakni hanya melakukan penyesuaian tambal sulam tanpa perubahan mendasar terhadap strategi penanganan. Akibatnya, kebijakan tersebut gagal menyentuh akar permasalahan dan tidak efektif dalam mengurangi cakupan daerah terdampak. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, wilayah yang mengalami krisis air bersih justru cenderung mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Krisis Air Bersih, *Political Budget Cycle*, Model Kebijakan *Incremental*, Kebijakan Publik, Banyumas.

ABSTRACT

The clean water crisis in Banyumas Regency from 2019 to 2024 has not shown significant improvement, despite being a concern for the local government. However, clean water is a crucial basic need, particularly due to its link to health issues such as stunting. The Ministry of Health states that the clean water crisis affects 60% of stunting cases. This study aims to analyze the political budget factors underlying the ineffectiveness of this crisis management. Using a mixed methods approach, this study combines quantitative and qualitative approaches. Qualitatively, the Political Budget Cycle (PBC) theory and the Incremental Policy Model theory are used to analyze the dynamics and patterns of clean water budget allocation in the Banyumas Regency Regional Budget (APBD) for the 2019-2024 period. Quantitatively, this study examines the correlation between clean water issues and public political preferences in the 2024 Legislative and Regional Elections. The results indicate that clean water budget policy in Banyumas Regency exhibits a Political Budget Cycle pattern, characterized by a significant increase in budget allocations approaching the general election year, which is not entirely based on technical needs. Furthermore, the policies adopted are incremental, meaning they only make patchwork adjustments without fundamental changes to the management strategy. As a result, these policies fail to address the root of the problem and are ineffective in reducing the scope of impacted areas. Data shows that from 2019 to 2024, the number of areas experiencing a clean water crisis actually tends to increase.

Keywords: *Clean Water Crisis, Political Budget Cycle, Incremental Policy Model, Public Policy, Banyumas.*

